

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI (Study Kasus pada SMP Negeri 1 Sumberpucung)

Mohamad Syahri, Arif Prasetyo Wibowo

^{1,2}FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur

Email: syahri@umm.ac.id, arifpwibowo@umm.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan sekolah Adiwiyata sebagai wahana pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa. Pendidikan Karakter bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membentuk Warga Negara yang tahu tentang hak dan kewajiban. Salah satunya adalah pengembangan karakter cinta lingkungan hidup. Kondisi lingkungan hidup kita semakin lama semakin rusak. Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup diharapkan mampu membentuk karakter cinta lingkungan hidup. Penelitian ini mencoba menggali informasi tentang Analisis Kebijakan Kepala Sekolah menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri. Penggalan informasi sehubungan dengan Analisis Kebijakan Kepala Sekolah menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri meliputi hal-hal sebagai berikut: 1). Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri, 2). Faktor pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan. Penggalan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Penggalan data dilakukan pada responden yang dianggap memahami tentang kegiatan yang terkait dengan Analisis Kebijakan Kepala Sekolah menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri di SMP Negeri 1 Sumberpucung. Kegiatan ini dilakukan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Guru dan Siswa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sekolah Adiwiyata Mandiri, Pendidikan karakter

ABSTRACT

Development of the Adiwiyata school as a vehicle for the development of National Character Education. National character education is very important in order to form citizens who know about rights and obligations. One of them is the development of the character of loving the environment. Our environmental conditions are getting worse and worse. Through Environmental Education it is expected to be able to form the character of loving the environment. This research attempts to gather information about Principal Policy Analysis towards Mandiri Adiwiyata Schools. Information gathering regarding Principal Policy Analysis towards Mandiri Adiwiyata Schools includes the following: 1). Implementation of the Principal's Policy towards the Mandiri Adiwiyata School, 2). Supporting and Inhibiting Factors in Policy Implementation. Data collection was carried out by means of observation, interviews, documentation. Data collection was carried out on respondents who were considered to understand the activities related to the Principal's Policy Analysis towards the Adiwiyata Mandiri School at SMP Negeri 1 Sumberpucung. This activity was carried out to the Principal, Deputy Head of Secretary for Curriculum, Deputy Head of Student Affairs, Teachers and Students.

Keywords: Policy Implementation, Adiwiyata Mandiri School, Character education

PENDAHULUAN

Pendidikan yang memberdayakan adalah proses memanusiakan anak sehingga potensinya menjadi aktual dalam kematangan dan kemandirian hidupnya. Paling tidak dengan pendidikan yang memberdayakan, setiap anak akan mendapatkan kebutuhan dasar, dapat mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai individu, anggota masyarakat dan sebagai makhluk Tuhan. Pendidikan yang memberdayakan seharusnya terus diusahakan mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi (Syafaruddin, 2008).

Fenomena Industrialisasi telah merasuki sebagian besar dunia ketiga termasuk Indonesia (Syafaruddin, 2008), yang banyak memunculkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan industri yang begitu cepat tidak dipungkiri telah menjamin stabilitas politik, ekonomi, transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain kemajuan industri yang begitu cepat telah membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dampak negatif dari fenomena industrialisasi sebenarnya sudah dibuktikan oleh hasil kajian dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2007 yang dikutip Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa 11 dari 12 tahun terpanas sejak 1850 terjadi dalam waktu kurang dari 12 tahun terakhir. Kenaikan temperatur total dari tahun 1850-1899 sampai dengan tahun 2001-2005 adalah $0,76^{\circ}\text{C}$. Permukaan air laut rata-rata global telah meningkat dengan laju rata-rata 1,8 mm per tahun dalam rentang waktu antara tahun 1961 sampai 2003. Kenaikan total permukaan air laut yang berhasil dicatat pada abad ke-20 diperkirakan 0,17 m. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change yang mengatakan bahwa kegiatan manusia ikut berperan dalam pemanasan global sejak pertengahan abad ke-20 dan pemanasan global akan terus meningkat dengan percepatan yang lebih tinggi pada abad ke-21 apabila tidak ada upaya penanggulangan.

Dalam Pasal 65 poin keempat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa setiap orang berhak dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini institusi pendidikan juga diharapkan mampu untuk turut serta mengambil peran dalam pengelolaan lingkungan.

Pendidikan Lingkungan Hidup sangat erat dengan penanaman nilai-nilai moral untuk menghargai dan bertanggung jawab atas alam. Pendapat ini didukung oleh Murtillaksono et.al (2011) yang mendefinisikan Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai:

"Efforts to change behaviors and attitudes of individuals to improve their knowledge, skills, and awareness of environmental values, issues, and problems and to motivate people to participate in efforts to preserve the environment for the present and future generation."

Pendidikan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari pendidikan karakter secara implisit juga ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015 dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional (Puskurbuk, 2011). Menurut Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter yang dikeluarkan oleh Puskurbuk, 2011, satuan pendidikan sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai pembentukan karakter melalui program operasional satuan pendidikan, hanya saja perlu diperkuat dengan nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan pada satuan pendidikan dari 19 nilai hasil kajian empirik (Puskurbuk, 2011) yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Bahkan untuk Pendidikan Lingkungan Hidup sudah dicanangkan di Indonesia dan di sekolah secara implisit mulai kurikulum 1984 melalui Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH).

Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional No.03/MenLH/02/2010, No.01/II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program Adiwiyata. Sebuah kesepakatan yang diputuskan berdasarkan beberapa pertimbangan penting yaitu: untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan sumber daya manusia yang sadar dan mampu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan bahwa pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan mengenai lingkungan hidup perlu diberikan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat dan peserta didik pada semua satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Sekolah Adiwiyata yaitu sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid, dan pekerja lainnya), untuk mendorong upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan berdasarkan norma kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Implementasi Kebijakan

Pengertian tentang implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penerapan atau pelaksanaan, artinya yang ditrapkan atau dilaksanakan adalah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi kebijakan bisa didefinisikan juga sebagai cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Syafaruddin, 2008).

Fungsi implementasi menurut Suwitri (2011) adalah membentuk suatu upaya yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Implementasi sebenarnya menyangkut kreativitas dari pelaksana kebijakan untuk merancang dan menemukan alat-alat khusus untuk mencapai tujuan. Hal ini karena kebijakan negara pada umumnya masih berupa pernyataan-pernyataan umum tentang tujuan, sasaran, dan berbagai macam sarana yang masih harus dijabarkan kedalam program-program yang lebih rasional yang selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam proyek-proyek.

Menurut Wibowo (1994) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Implementasi kebijakan bisa didefinisikan juga sebagai cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi sendiri menurut Wibowo (1994), mulai berlangsung pada tahap penyusunan program. Wibowo memberikan beberapa langkah untuk menyusun program yaitu:

- a. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi
- b. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai
- c. Merancang struktur proses implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Wibowo (1994) dipengaruhi oleh isi kebijakan, dan lingkungan implementasi, dimana fenomena isi kebijakan mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijaksanaan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan atau yang akan diterima oleh kelompok sasaran; (3) derajat perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program atau pengambil keputusan sudah tepat; (5) siapa pelaksana program, apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementasinya dengan rinci; (6) ketercukupan sumberdaya yang memadai atau yang dikerahkan untuk mendukung program.

Menurut Abidin (204) pelaksanaan kebijakan pada umumnya lebih sukar dari sekedar merumuskannya. Munculnya masalah dalam kebijakan karena proses perumusan kebijakan memerlukan pemahaman tentang berbagai aspek yang mengakibatkan tidak semua kebijakan dapat dilaksanakan dengan sempurna. "pelaksanaan menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sukar diprediksi." Selanjutnya Abidin berpendapat kebijakan lebih sukar dilaksanakan karena dalam proses perumusannya terdapat asumsi, generalisasi, dan simplikasi yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dilaksanakan sehingga muncul implementation gap atau kesenjangan antara yang dirumuskan dengan yang dapat dilaksanakan. Meskipun dalam batas tertentu kesenjangan tersebut masih dapat ditoleransi atau malah dibiarkan. Meskipun begitu dalam monitoring tetap harus diidentifikasi agar pelaksana dapat memperbaiki kekurangannya.

Pendidikan Lingkungan Hidup

Bakshi dan Naveh (1978) mengatakan *environmental education is a new philosophy of teaching*. Menurut Bakshi dan Naveh Pendidikan Lingkungan Hidup bisa dirangkum menjadi sebuah gambaran tentang keadaan pengetahuan dan sikap dari siswa untuk menghargai dan mengerti konsep kata ecosystem. Pendidikan Lingkungan Hidup selanjutnya jika dilihat dari sudut kognitif berarti pengembangan pengertian tentang biosphere, tentang bumi dan isinya yang didiami oleh makhluk hidup.

Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Menurut Murti Laksono et.al (2011) ada dua jenis prinsip teknik untuk menggabungkan materi konservasi, lingkungan, dan mitigasi bencana alam ke dalam kurikulum: metode infusi, yang

integratif, dan metode block, yang monolitik. Metode infusi yang juga dikenal dengan metode pendekatan integrasi adalah sebuah metode yang mengintegrasikan isi materi dan proses pemberian materi yang berkaitan dengan konservasi alam dan mitigasi bencana alam kedalam kurikulum yang berlaku. Biasanya materi-materi tersebut telah digabungkan dengan materi-materi ilmu alam murni, ilmu sosial, dan sejarah.

Pendekatan integrasi sangat sesuai untuk pendidikan formal setingkat sekolah dasar sampai dengan menengah, karena pendekatan integrasi tidak memerlukan waktu ekstra di sekolah sehingga implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup bisa berjalan lebih efisien karena para murid tidak dibebani dengan tambahan waktu. Meskipun begitu pendekatan integrasi menuntun para guru untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang materi-materi lingkungan hidup yang akan diajarkan. Berbagai macam sumber harus dipertimbangkan ketika merumuskan dan menyusun sebuah rencana proses pembelajaran (RPP).

Guru harus menganalisa dan mengumpulkan materi-materi yang sesuai untuk dikembangkan menjadi materi pembelajaran termasuk materi-materi yang dikaitkan dengan alam, manusia dan lingkungan sosial. Materi-materi yang berkaitan dengan manajemen lingkungan seperti informasi tentang kebijakan lingkungan, konservasi, manajemen ruang dan polusi serta penugasan yang berdampak pada lingkungan. Sumber-sumber bahan ajar dan pembelajaran mencakup buku, laporan penelitian, jurnal, internet, sumber multimedia dan lingkungan baik alam, sosial, budaya, maupun ekonomi.

Sedangkan dalam metode block, mitigasi lingkungan, konservasi, dan bencana alam dipelajari dalam sebuah mata pelajaran yang berdiri sendiri. Metode ini menggunakan pendekatan monolitik yang berasumsi bahwa setiap mata pelajaran memiliki tujuan masing-masing. Pendekatan ini dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu mengembangkan disiplin ilmu misalnya pendidikan mitigasi lingkungan yang setara dengan mata pelajaran yang lainnya yang ada pada kurikulum. Kedua mengembangkan paket pendidikan dalam sebuah mata pelajaran kimia dan fisika. Materi-materi lingkungan biasanya terintegrasi dalam kurikulum sekolah berupa format muatan lokal. Pendidikan berbasis lingkungan dapat dikembangkan misalnya melalui program Adiwiyata (Murtalaksono et al, 2011). Pelaksanaan program Adiwiyata merupakan amanah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Program Adiwiyata menurut panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Program ini diharapkan dapat mengajak warga sekolah melaksanakan proses belajar mengajar materi lingkungan hidup dan turut berpartisipasi melestarikan serta menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya. Kata Adiwiyata berasal dari 2 kata Sansekerta

“Adi” dan “Wiyata”. Adi mempunyai makna besar, agung, baik, ideal atau sempurna. Wiyata adalah tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam berkehidupan sosial. Sebagai satu kata Adiwiyata bisa memiliki makna tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah dapat turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup.

Ada beberapa norma dasar dan kehidupan yang harus dikembangkan dalam program Adiwiyata yang meliputi kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kecuali itu program Adiwiyata harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipatif di mana komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan tanggungjawab

dan peran mereka. Kedua adalah prinsip berkelanjutan dimana seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.

Dengan melaksanakan kebijakan pendidikan lingkungan hidup melalui program Adiwiyata ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh yaitu :

- a. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah dan penggunaan berbagai sumber daya.
- b. Meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan konsumsi berbagai sumber daya dan energi.
- c. Meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah
- d. Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah
- e. Meningkatkan upaya menghindari berbagai resiko dampak lingkungan negatif dimasa yang akan datang.
- f. Menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.
- g. Mendapat penghargaan Adiwiyata

Untuk mewujudkan program Adiwiyata sekolah harus berusaha memenuhi empat (4) indikator yaitu:

1. Pengembangan kebijakan Sekolah Peduli dan berbudaya lingkungan.

Indikator yang pertama mengandung enam (6) kriteria yang harus terus menerus diusahakan untuk dipenuhi yaitu pengembangan visi misi yang tertuang dalam dokumen KTSP yang mencerminkan adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Visi misi tersebut selanjutnya diuraikan dalam rencana program dan kegiatan sekolah dan diketahui/dipahami oleh semua warga sekolah.

Kriteria yang kedua adalah adanya kebijakan tentang pengembangan materi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yang termang dalam dokumen KTSP selain itu sekolah juga melaksanakan kegiatan rutin bertema lingkungan hidup yang mendukung pembelajaran lingkungan hidup sekurang-kurangnya sekali sebulan.

Kriteria yang ke tiga adalah adanya program atau kebijakan peningkatan kapasitas SDM di bidang lingkungan melalui kegiatan seperti seminar, lokakarya/workshop, berjumlah sekurang-kurangnya 50% dari jumlah total tenaga pendidik dan non kependidikan, baik atas inisiatif sekolah maupun pihak lain selama 4 tahun. Peningkatan kapasitas SDM juga bisa dilakukan melalui kegiatan studi banding, training dan pendidikan berjenjang berjumlah sekurang-kurangnya 20% dari jumlah tenaga pendidik dan non kependidikan, baik atas inisiatif sekolah maupun pihak lain selama 4 tahun.

Yang ke empat adalah adanya kebijakan sekolah dalam upaya efisiensi penggunaan air, listrik, alat tulis kantor, dan plastik, termasuk petunjuk teknis dan pelaksanaannya yang didukung oleh komite dan melibatkan seluruh warga sekolah, serta adanya kegiatan monitoring secara rutin.

Kriteria yang ke lima adalah adanya kebijakan, peraturan dan/atau tata tertib sekolah yang mengatur kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah, seperti pengelolaan kantin, sampah, toilet, ruang kelas, dan kawasan sekolah yang berwawasan lingkungan melalui ketersediaan ruang terbuka hijau. Di samping itu peraturan atau tata tertib tersebut harus disosialisasikan melalui rapat, upacara, seminar, serta penyebaran leaflet, spanduk, dan booklet kepada semua warga sekolah.

Yang terakhir adalah kebijakan pengalokasian dana sekolah secara rutin dalam RAPBS untuk kegiatan pengelolaan dan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup misalnya melalui peningkatan kualitas fisik lingkungan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan materi ajar, minimal 10 % dari total anggaran. Kebijakan penggalangan dana mandiri untuk pengelolaan lingkungan hidup, misalnya pengumpulan dana dari penjualan kompos hasil karya Warga sekolah, penjualan hasil tanaman langka yang dipelihara sekolah, atau penggalangan dana yang berasal dari kerjasama dengan sponsor yang peduli lingkungan.

2. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan

Indikator yang kedua harus dikembangkan dengan pengembangan pendidikan lingkungan hidup secara terintegrasi pada mata pelajaran dan monolitik sebagai mata pelajaran tersendiri atau

muatan lokal dengan menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, silabus pendidikan lingkungan hidup yang monolitik dan terintegrasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan jumlah guru yang mengampu pendidikan lingkungan hidup baik monolitik maupun terintegrasi dengan memiliki pendidikan lingkungan hidup sesuai beban materi yang diajarkan. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan juga ditandai dengan tersedianya bahan ajar/literatur/referensi sekurang-kurangnya 10 judul yang relevan dengan isu lingkungan. Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dokumentasi hasil belajar pendidikan lingkungan hidup setiap peserta didik.

Pengembangan Kurikulum berbasis lingkungan juga harus ditandai dengan teridentifikasinya isu lingkungan lokal yang dapat mendukung penerapan Perda, Renstra, kebijakan lain tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pemda setempat. Dengan teridentifikasinya isu lokal maka pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dapat terlaksana melalui kegiatan eksplorasi permasalahan lingkungan hidup masyarakat setempat yang tertuang dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dengan dukungan dan keterlibatan komite sekolah dalam penentuan materi pendidikan lingkungan hidup akan mendukung tersedianya bahan ajar yang kontekstual dengan potensi dan persoalan lingkungan hidup di masyarakat sekitar.

Kriteria yang ke tiga adalah pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya ditandai dengan adanya aksi provokatif yang mendorong terciptanya karakter peduli dan berbudaya lingkungan, dilakukannya pendidikan lingkungan hidup secara proporsional antara teori dan praktik, penerapan secara variatif metode pembelajaran yang berfokus pada siswa sesuai dengan kebutuhan antara lain FGD (Focus Group Discussion), penugasan, observasi, project work, dll, pemanfaatan narasumber antara lain tokoh masyarakat, pakar lingkungan hidup, orang tua peserta didik secara terencana, dan terkait dengan mata pelajaran, pemanfaatan nilai kearifan dan budaya lokal dalam pembelajaran lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pengembangan metode belajar baik biotik maupun abiotik.

Kriteria yang terakhir adalah pengembangan kegiatan kurikuler untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup yang ditandai dengan terlaksananya kegiatan perlindungan dan pengelolaan pendidikan lingkungan hidup yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum, dan hasil kegiatannya yang mendukung peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang pendidikan lingkungan hidup sesuai dengan 50% dari jumlah mata pelajaran yang diintegrasikan dan monolitik, mengimplementasikan hasil pembelajaran pendidikan lingkungan hidup secara terbuka bagi masyarakat melalui pameran, seminar atau workshop minimal dua (2) kegiatan per tahun.

3. Pengembangan kegiatan berbasis partisipatif

Pengembangan kegiatan berbasis partisipatif ditandai dengan menciptakan berbagai kegiatan ekstra kurikuler dalam pembelajaran persoalan lingkungan hidup bagi warga sekolah minimal 1 kegiatan secara rutin yang berorientasi lingkungan hidup pada setiap program ekstra kurikuler/kurikuler dan terlaksananya kegiatan lingkungan berbasis partisipatif yang diprakarsai oleh sekolah dengan melibatkan masyarakat sekitar lebih dari 4 (empat) kegiatan per tahun.

Kedua adalah dengan mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar dengan telah mengikuti lebih dari 4 (empat) kegiatan aksi lingkungan hidup yang diprakarsai oleh pihak luar sebagai kegiatan ekstrakurikuler siswa.

Kriteria yang terakhir adalah membangun kegiatan kemitraan atau memprakarsai pengembangan pendidikan lingkungan hidup dengan melakukan lebih dari 5 (lima) kegiatan kemitraan dan memprakarsai berbagai kegiatan aksi lingkungan hidup dan senantiasa membangun kerjasama jangka panjang dan berkelanjutan untuk pengembangan program lingkungan hidup dengan berbagai pihak.

4. Pengembangan dan atau pengelolaan sarana pendukung sekolah

Sekolah menyediakan pengembangan fungsi pendukung sekolah yang ada untuk Pendidikan Lingkungan Hidup dengan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran lingkungan hidup, paling tidak ada 5 (lima) prasarana/sarana sekolah sebagai media pembelajaran lingkungan hidup. Sekolah melakukan peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan di dalam dan di luar kawasan sekolah dengan menyediakan dan memelihara dengan baik

- (a) Pengaturan cahaya ruang
- (b) Ventilasi udara secara alami
- (c) Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh atau penghijau, pemanfaatan sumur resapan dan atau biopori serta pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah.

Sekolah juga terus berupaya untuk melakukan penghernatan terhadap efisiensi penggunaan air, listrik, alat tulis kantor, plastik dan bahan lainnya, serta dapat dibuktikan keberhasilannya selama 3 (tiga) tahun. Kriteria yang lain adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat ditandai dengan adanya:

- (a) Lokasi kantin yang memenuhi syarat kebersihan dan ramah lingkungan
- (b) Pemeriksa berkala minimal 1 (satu) kali setahun terhadap kualitas makanan kantin
- (c) Pemantauan terhadap jenis, kemasan makan dan kebersihan kantin secara rutin minimal 1 (satu) kali sebulan
- (d) Penggunaan kemasan ramah lingkungan
- (e) Pemberian penyuluhan secara rutin kepada pedagang minimal 1 (satu) kali setahun
- (f) Guru penanggungjawab kantin atau pengelola/ penyedia makanan sehat.

Sekolah mengembangkan pengelolaan sampah dan bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas pengelolaan sampah dengan cara;

- (a) Praktek pemilahan sampah
- (b) Pengelolaan sampah yang memenuhi syarat dengan menyediakan tempat sampah terpisah minimal dua jenis organik dan anorganik, melakukan kegiatan 3R dan pengomposan, menyediakan jumlah tenaga kebersihan yang mencukupi, adanya mekanisme keterlibatan peserta didik dan guru
- (c) Perubahan perilaku warga sekolah dalam memperlakukan sampah.

Pendidikan Karakter

Dalam pendidikan karakter Lickona (1992) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu *moral knowing* atau pengetahuan tentang moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar siswa didik mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan.

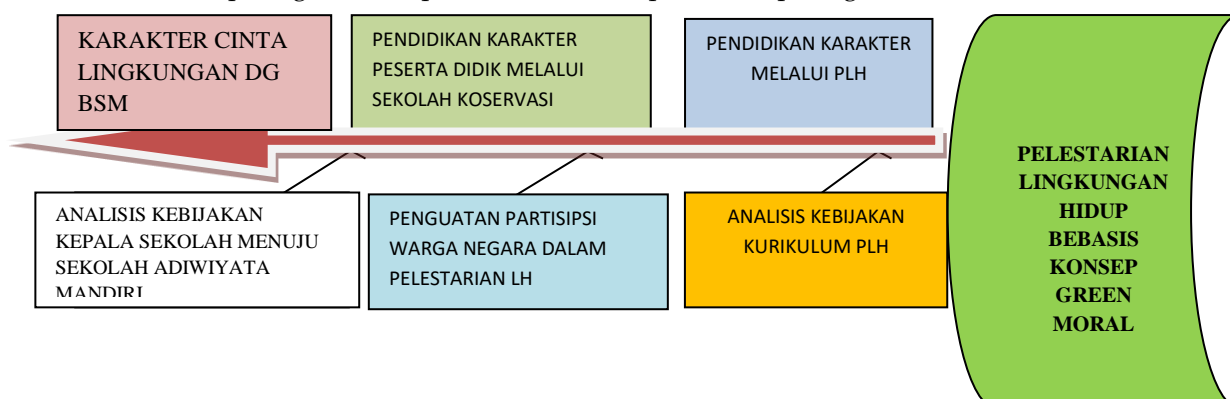
Moral Knowing. Terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya moral knowing yaitu: 1) moral awereness, 2) knowing moral values, 3) persperctive taking, 4) moral reasoning, 5) decision making dan 6) self-knowledge.

Moral Feeling. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek dari emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter yakni : 1) conscience, 2) self-esteem, 3) empathy, 4) loving the good, 5) self-control dan 6) humility.

Moral Action. Perbuatan/tindakan moral ini merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (*act morally*) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu : 1) kompetensi (*competence*), 2) keinginan (*will*) dan 3) kebiasaan (*habit*).

Pendidikan lingkungan hidup harus mampu mendorong terjadinya integrasi kearifan sikap dan perilaku dalam menghadapi masalah yang timbul karena tatanan alam (gempa bumi, meletusnya gunung api dsb), dengan kerusakan atau kerugian karena perilaku jenis makhluk hidup termasuk manusia. Untuk menuju hal tersebut diatas Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Malang mencoba mengimplementasikan Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup.

Beberapa bagian telah peneliti lakukan dapat dilihat pada gambar berikut :



Kepala sekolah sebagai manajer

Sebagai seorang manajer, kepala sekolah harus mempunyai empat kompetensi dan ketrampilan utama dalam menajerial organisasi, yaitu ketrampilan membuat perencanaan, keterampilan mengorganisasi sumberdaya, keterampilan melaksanakan kegiatan, dan keterampilan melakukan pengendalian dan evaluasi. Empat keterampilan manajerial kepala sekolah akan dibahas secara detail berikut ini.

Pertama, keterampilan melakukan perencanaan. Kepala sekolah harus mampu melakukan proses perencanaan, baik perencanaan jangka pendek, menengah, maupun perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang dibuat untuk kepentingan jangka pendek, misalnya untuk satu bulan hingga satu tahun ajaran. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan untuk pekerjaan yang memerlukan waktu 2-5 tahun, sedangkan perencanaan jangka panjang meliputi perencanaan sekitar 5-10 tahun. Proses perencanaan menjadi salahsatu keterampilan yang penting mengingat perencanaan yang baik merupan setengah dari kesuksesan suatu pekerjaan. Prinsip perencanaan yang baik, akan selalu mengacu pada: pertanyaan: “Apa yang dilakukan (what), siapa yang melakukan (who), kapan dilakukan (when). Di mana dilakukan (where), dan bagaimana sesuatu dilakukan (how)”, Detail perencanaan inilah yang akan menjadi kunci kesuksesan pekerjaan.

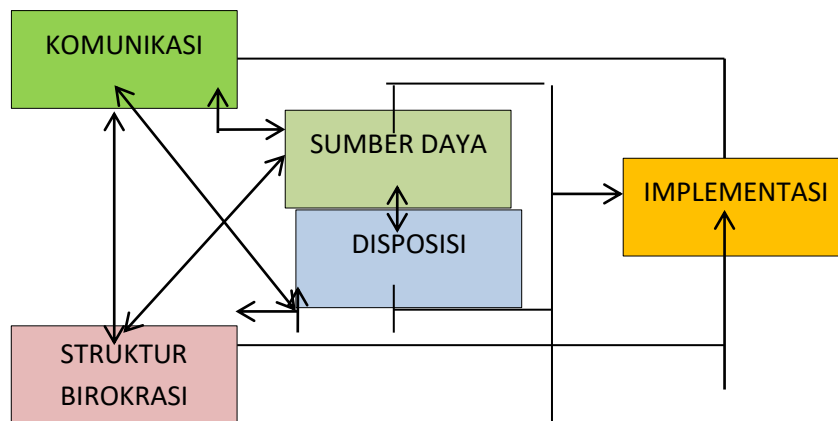
Kedua, keterampilan melakukan pengorganisasian. Lembaga pendidikan mempunyai sumberdaya yang cukup besar mulai sumberdaya manusia yang terdiri dari guru, karyawan, dan siswa, sumberdaya keuangan, hingga fisik mulai dari gedung serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Salah satu masalah yang sering melanda lembaga pendidikan adalah keterbatasan sumberdaya. Kepala sekolah harus mampu menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Walaupun terbatas, namun sumberdaya yang dimiliki adalah modal awal dalam melakukan pekerjaan. Karena itulah, seni mengola sumberdaya menjadi ketrampilan manajerial yang tidak bisa ditinggalkan.

Ketiga, adalah kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tahapan ini mengisyaratkan kepala sekolah membangun prosedur operasional lembaga pendidikan, memberi contoh bagaimana bekerja, membangun motivasi dan kerjasama, serta selalu melakukan koordinasi dengan ber bagai elemen pendidikan. Tidak ada gunanya perencanaan yang baik jika dalam implementasinya tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan professional.

Keempat, kepala sekolah harus mampu melakukan tugas-tgas pengawasan dan pengendalian. Pengawasan (supervisi) ini meliputi supervise manajemen dan juga supervisi dalam bidang pengajaran. Sepervisi manajemen artinya melakukan pengawasan dalam bidang pengembangan keterampilan dan kompetensi adminstrasi dan kelembagaan, sementara supervisi pengajaran adalah melakukan pengawasan dan kendali terhadap tugas-tugas serta kemampuan tenaga pendidik sebagai seorang guru. Karenanya kepala sekolah juga harus mempunyai kompetensi dan keterampilan professional sebagai guru, sehingga ia mampu memberikan supervisi yang baik kepada bawahannya (Lazismu, 2009).

Pisau Analisa Berdasarkan Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan ketiga yang berspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

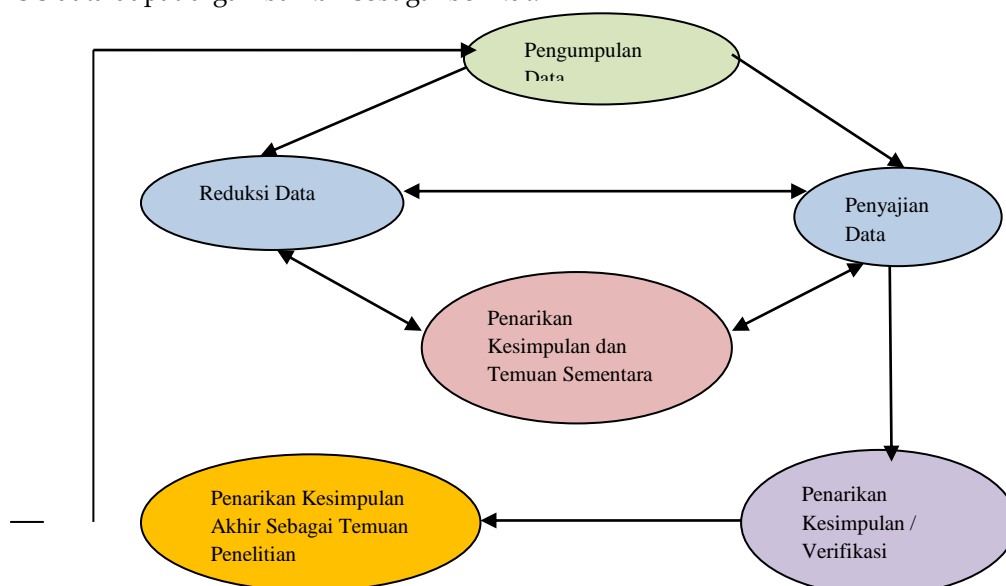


Gambar: Model Pendekatan “*Direct and Indirect Impact on Implementation*” (George Edward III)

METODE PENELITIAN

Desain dan Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumberpucung, Kabupaten Malang. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data: a). wawancara mendalam, bertujuan menggali informasi tentang pendidikan karakter bangsa melalui pendidikan lingkungan hidup, b). observasi, merupakan teknik pengumpulan data dilapangan melalui pngamatan yang seksama, dimana peneliti melihat langsung kegiatan penelitian yang sdang diteliti (Moleong 2005:121). Dengan demikian dapat dipahami bahwa observasi merupakan suatu tekik yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan memusatkan segenap perhatian terhadap suatu obyek penelitian dengan menggunakan seluruh indra. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan, pengujian kebenaran terhadap data-data yang telah dikumpulkan dengan cara menganalisis. Setiap data yang terkumpul dianalisis dan diverifikasi kemudian ditarik kesimpulan sampai ditemukan pola-pola atau tema bermakna sesuai dengan fokus penelitian. Alur proses analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diadaptasi dari Model Miles&Hubermas

Lokasi Penelitian

Secara *Purpasive* lokasi penelitian ini ditetapkan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan yaitu di SMP Negeri 2 Sumberpucung, Kabupaten Malang

Data dan Sumber Data

Jenis Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan skunder. Sumber data (*Key Informan*) Kepala Sekolah, Wakasek bidang Kurikulum, Wakasek bidang kesiswaan, Guru dan Siswa

Teknik Analisis Data

Analisis data dijelaskan oleh Lexy Moleong (2006: 280) sebagai proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan permasalahannya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yang dikemukakan oleh Glasser & Strauss, yang meliputi tahap (a) reduksi data dan aktivitas identifikasi, dan pengkodean data, (b) kategorisasi data, (c) sintesis, dan yang dirumuskan dalam bentuk draft atau konsep. Adapun langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya berupa aktivitas berikut ini:

1) Reduksi data

Dalam tahap ini peneliti melakukan identifikasi satuan atau unit dalam kaitannya dengan upaya mendeskripsikan permasalahan yang terkait dengan Analisis Kebijakan Kepala Sekolah menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri, yang telah dilaksanakan selama ini, yang meliputi (a) wujud kegiatan, (b) sumber kegiatan, (c) orientasi pemberlakuan, (d) aplikasi pelaksanaan dan permasalahannya. Dari aktivitas ini peneliti mencoba mengkodekannya pada setiap satuan sesuai dengan asal sumber datanya sedangkan terkait dengan data, peneliti melakukan reduksi data dalam bentuk aktivitas yang berhasil dikoleksikan baik dari dokumen berupa buku, majalah, ataupun dari hasil pencatatan di lapangan terhadap Analisis Kebijakan Kepala Sekolah menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri.

2) Kategorisasi

Aktivitas yang peneliti laksanakan dalam tahap ini terkait dengan upaya menyeleksi atau memilih-milih satuan yang sama dalam bagian-bagian sesuai kategorinya, baik untuk data yang telah tereduksi terkait dengan Analisis Kebijakan Kepala Sekolah menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri

3) Sintesis

Dalam tahap ini peneliti mencoba mengkaitkan antara kategori yang satu dan yang lain yang telah terumuskan guna mendapatkan gambaran yang akan dideskripsikan, khususnya terkait Analisis Kebijakan Kepala Sekolah menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, wawancara, data dokumentasi yang dilakukan peneliti selama pengumpulan data dalam Bab 5 ini akan dideskripsikan temuan penelitian tentang: "Analisis Kebijakan Kepala Sekolah menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri (Study Kasus pada SMP Negeri 1 Sumberpucung)" secara rinci hasil penelitian akan diuraikan dalam dua Subagian, yaitu: (1) Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri, (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri di SMP Negeri 1 Sumberpucung.

1. Implementasi kebijakan Kepala Sekolah dalam menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri

Dalam mewujudkan program Sekolah Adiwiyata Mandiri Kepala Sekolah memegang peran yang sangat strategis, karena kepala sekolah sebagai top leader dalam pengelolaan sekolah. Kepala Sekolah sekaligus juga sebagai manajer. Keberhasilan suatu program di suatu sekolah memang dipengaruhi oleh beberapa komponen. Namun komponen kepala sekolah disini memegang peran yang sangat penting.

Terkait dengan implementasi program sekolah menuju sekolah Adiwiyata Mandiri, sebagaimana diungkapkan oleh Guru penanggung jawab program sekolah Adiwiyata Mandiri, sebagai berikut:

"...kepala Sekolah menetapkan dan mengembangkan Visi dan misi sekolah yang terkait dengan pendidikan lingkungan hidup menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri ...mensosialisasikan kepada warga sekolah dalam rangka menjalankan program Adiwiyata Mandiri. Tidak hanya

berhenti disitu saja selanjutnya Kepala Sekolah mendorong dan memantau pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah tersebut dan memberikan penghargaan kepada insan-insan yang telah menjalankan dan berperan Program Adiwiyata Mandiri". (GR, 55 Th)

Selanjutnya Wakasek Bidang Sarpras menambahkan, tentang peran Kepala Sekolah dalam mewujudkan program Adiwiyata, di SMP Negeri 1 Sumberpucung menuturkan, sebagai berikut:

"Dalam Implementasi kebijakan Sekolah Adiwiyata Mandiri diperlukan kemauan dan semangat yang tinggi dari warga Sekolah. Tugas Kepala Sekolah selain mencari dana atau anggaran untuk berjalannya program Adiwiyata dan mengawasi berjalannya program tersebut. Kepala sekolah memberikan motivasi kepada warga sekolah untuk menjalankan Program Adiwiyata kemudian memberikan penghargaan kepada warganya yang telah berhasil menjalankan program tersebut, sehingga warga yang diberi penghargaan akan menjadi lebih semangat dan memberikan motivasi kepada warga yang lainnya untuk mendapatkan penghargaan juga.". (WKSP, 51 Th)

Berdasarkan penjelasan responden tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran kepala sekolah dalam mensukseskan program sekolah Adiwiyata Mandiri diantaranya; mensosialisasikan program kegiatan keseluruhan warga sekolah dilanjutkan pemantauan pelaksanaan program. Pemberian penghargaan dilakukan kepada warga yang telah berhasil melaksanakan kegiatan, supaya bisa lebih bersemangat. Selanjutnya terkait dengan perannya, Kepala Sekolah menjelaskan perannya dalam implementasi program Sekolah Adiwiyata Mandiri, sebagai berikut:

"... yang saya lakukan membentuk Tim Sekolah. Tim sekolah adalah tim yang berperan penting dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan di sekolah, termasuk bagaimana melibatkan semua unsur warga sekolah menjadi penting termasuk keterlibatan aktif dari seluruh siswa. Partisipasi siswa menjadi elemen penting. Untuk mensukseskan sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan perlu dibentuk tim yang anggotanya antara lain terdiri atas: Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Orangtua Siswa, Warga Sekolah (petugas kebersihan, petugas tata usaha, pengelola kantin), Pemerintah daerah (lurah, camat dan lain-lain), masyarakat disekitar sekolah. Tim inti terdiri atas kepala sekolah, guru yang ditambah orang tua murid dan masyarakat sekitar. Anggota inti ini melakukan pertemuan secara teratur. Anggota tim ini kemudian menugaskan kelompok kerja yang lebih kecil untuk melaksanakan tugas harian. Kelompok kecil ini dapat mengikutsertakan siswa. (KS, 57 Th)

Senada dengan penjelasan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumberpucung tentang perannya dalam mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan hidup atau Sekolah Adiwiyata Mandiri Guru Penanggung Jawab Program menguraikan sebagai berikut:

Kajian lingkungan sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan dirancang untuk memberikan gambaran kondisi sekolah. Hasil kajian lingkungan akan menginformasikan Rencana Aksi apa yang akan dilakukan. Selain itu, kajian lingkungan juga akan membantu sekolah untuk menentukan perubahan apa diperlukan, mendesak atau tidak dibutuhkan sama sekali. Ini juga akan membantu menetapkan sasaran yang realistis serta mengukur keberhasilan yang dicapai. Kajian lingkungan oleh tim disekolah mencakup berbagai isu lingkungan sekolah, misalnya: Sampah- Air- Energi- Makanan dan kantin sekolah- Keanekaragaman hayati" (GR, 53 Th)

Berdasar penjelasan responden di atas peran kepala sekolah adalah: membentuk Tim yang melibatkan Kepala Sekolah, Guru, siswa dan orang tua siswa,sertamerancang kegiatan yang akan dilakukan serta menginformasikan rencana aksi. Selanjutnya Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan berpendapat tentang Rencana Aksi, seperti yang dituturkan sebagaiberikut:

"... kesemua isu ini harus diamati selama kajian lingkungan dilakukan dengan menggunakan instrumen checklist. Checklist berisi serangkaian jawaban "ya atau tidak". Namun juga terdapat kolom untuk menuliskan komentar yang kemudian dapat digunakan untuk menambah informasi dalam penyusunan Rencana Aksi Sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan. Yang perlu untuk diperhatikan adalah, bahwa setiap sekolah harus melakukan kajian lingkungan sesuai dengan kondisi sekolah dan dengan cara yang terbaik yang dapat dilakukan. Libatkan peserta didik sebanyak mungkin. Kajian lingkungan dilakukan pada kurun waktu tertentu, misalnya dilakukan tahunan atau dua tahun sekali sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan kinerja tim sekolah. (WKKS, 50 Th)

Berkaitan dengan Rencana Aksi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumberpucung berpendapat, sebagai berikut:

Rencana aksi menjadi inti dari program sekolah yang berbudaya dan berwawasan lingkungan. Perencanaan ini adalah serangkaian kegiatan dan sasaran yang dijadwalkan. Perencanaan ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan lingkungan sebagai hasil dari kajian lingkungan yang telah dilakukan. Seperti halnya dengan setiap tahapan dari proses Sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan, siswa harus terlibat dalam menyusun Rencana Aksi sekolah. (KS, 53 Th)

Pendapat sedana juga dikemukakan oleh Wakil Kepala Sekolah yang membidangi Kurikulum tentang Rencana Aksi menuturkan sebagai berikut:

"Rencana aksi harus dikembangkan berdasarkan hasil kajian lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan disusun dengan tujuan yang jelas, tenggat waktu yang jelas, dan juga penanggung jawab kegiatan yang jelas. Hal tersebut dilakukan untuk setiap tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, yang penting untuk dilakukan adalah berbagai kegiatan yang akan dilakukan dengan melibatkan siswa sedapat mungkin dikaitkan dengan kurikulum sebagai suatu bagian dari proses pembelajaran". (WKKK, 54 Th)

Dalam penyusunan Rencana Aksi Guru Penanggung Jawab Program juga berpendapat untuk menguatkan pendapat-pendapat sebelumnya. Pendapat Guru Penanggung Jawab Program dapat dipaparkan sebagai berikut:

"Dalam penyusunan rencana aksi yang juga perlu diperhatikan adalah pastikan bahwa sasaran yang ditetapkan realistis sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki dan dapat dicapai. Jangan terlalu ambisius sehingga sulit mencapai sasaran karena kegagalan dalam memenuhi target dapat berakibat menurunkan motivasi. Jika hasil dari kajian lingkungan mengharuskan bahwa sekolah perlu membuat banyak sasaran yang ingin dicapai, jangan diselesaikan semuanya sekaligus. Sebaiknya membuat suatu skala prioritas kegiatan. Prioritas kegiatan dapat dilakukan dengan membagi sasaran ke dalam rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang." (GRPJ, 56 Th)

Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam membuat perencanaan aksi di sekolah Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan menyampaikan pendapatnya sehubungan dengan peran Kepala Sekolah, sebagai berikut: d

"... Penyusunan rencana aksi berangkat dari hasil kajian lingkungan yang telah dilakukan oleh tim lingkungan sekolah. Pilihlah topik yang sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan mempertimbangkan kemampuan dan tenggat waktu yang dimiliki. Misalnya, sekolah ingin mengatasi permasalahan sampah sebagai kegiatan utama. Maka semua sumberdaya yang dimiliki sekolah diarahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan jika ada bagian yang tidak mampu diselesaikan oleh sekolah, maka perlu dicari cara bagaimana sekolah bekerja sama dengan pihak lain agar dapat mengatasinya. Misalnya bekerjasama dengan dinas kebersihan dalam mengangkut sampah ke TPA." (WKKS, 50 Th)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa responden di atas tentang penyusunan Rencana Aksi dapat disimpulkan bahwa supaya Rencana Aksi dapat berhasil mencapai kesuksesan maka sekolah harus melakukan kajian yang mendalam, dalam melakukan kajian harus melibatkan semua komponen yang ada di sekolah, sasaran harus jelas, program harus realistis dan juga harus ada jadwal yang jelas. Dalam memilih topik kegiatan yang mendukung terwujudnya sekolah berwawasan lingkungan hidup disesuaikan dengan prioritas sekolah dan usahakan membangun kerjasama dengan baik dengan pihak luar sekolah. Berkaitan dengan pengukuran tingkat keberhasilan dalam menjalankan program kegiatan sekolah berwawasan lingkungan hidup, ada beberapa strategi seperti yang disampaikan oleh WKSP, sebagai berikut:

"...menetapkan bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Siapkan instrumen yang dapat mengukur setiap capaian program yang telah ditetapkan. Misalnya jika anda ingin mengatasi konsumsi energi, pengukuran dapat dilakukan dengan cara mengamati tagihan listrik setiap bulannya. Mendiiskusikan jangka waktu untuk setiap aktivitas. Apakah kegiatan tersebut akan dicapai dalam jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Menetapkan siapa yang akan menjadi penanggung jawab setiap kegiatan. Sedapat mungkin kegiatan harus

melibatkan siswa. Melakukan monitoring terhadap alokasi dana yang dibelanjakan untuk setiap aktivitas yang dilakukan". (WKSP, 53 Th)

Senada dengan uraian di atas Kepala Sekolah menambahkan pendapatnya tentang bagaimana mengetahui apakah Tim Sekolah telah mencapai target yang telah ditentukan, sebagai berikut:

"...untuk mengetahui apakah tim sekolah telah berhasil mencapai target yang tercantum dalam Rencana Aksi atau tidak, maka harus dilakukan pemantauan dan mengukur kemajuan yang diharapkan. Proses monitoring terus menerus akan membantu memastikan bahwa kegiatan ini tetap berkelanjutan. Metode monitoring yang digunakan akan tergantung pada sasaran dan kriteria pengukuran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Aksi untuk setiap topik. Dalam beberapa kasus akan ada cara mudah dan akurat untuk mengukur kemajuan, antara lain": (KS, 53 Th)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan program sekolah berwawasan lingkungan hidup maka perlu menetapkan Tim, menyiapkan instrumen-instrumen yang dibutuhkan, melakukan monitoring dana yang dibelanjakan, dilakukan pemantauan semua kegiatan atau proses monitoring.

Kegiatan praktis yang dilakukan siswa yang didampingi oleh Tim dalam rangka menuju sekolah berwawasan lingkungan hidup, harus dilakukan secara kontinue dan bekerjasama antar komponen yang ada. Kegiatan tersebut harus membawa dampak pembelajaran dan pembiasaan. Dalam membentuk jiwa cinta sekolah berwawawsan lingkungan hidup ada kegiatan-kegiatan yang ringan yang menyenangkan dan bisa membentuk karakter. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh GRPJ, sebagai berikut:

"... melakukan pembacaan meter dan perhitungan tagihan energi untuk melihat perubahan kegiatan penghematan energi. · Menimbang sampah yang terkumpul untuk didaur ulang. Penimbangan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh kegiatan pengelolaan sampah. · Mendokumentasikan setiap tahap kegiatan sebelum, selama dan setelah foto-foto untuk membandingkan perubahan yang terjadi di sekolah. · Membuat daftar spesies (jika memungkinkan) sebelum dan setelah kegiatan untuk melihat pengaruh untuk menunjukkan dampak kegiatan terhadap keanekaragaman hayati di sekitar sekolah Menggunakan kuesioner dan survei untuk mengumpulkan data kemajuan kegiatan dengan melibatkan siswa. · Tim sekolah juga harus memastikan bahwa:- Hasil pemantauan diumumkan ke warga sekolah, misalnya dalam bentuk grafik.- Kemajuan kegiatan diumumkan di papan pengumuman Sekolah". (GRPJ, 56)

Sejalan dengan pendapat Guru Penanggung Jawab Program, WKKK menambahkan pendapatnya sebagai berikut:

"...salah satu cara terbaik untuk melibatkan warga sekolah adalah untuk mengatur kegiatan rutin dan hari-hari tertentu yang dianggap penting (action day). Pada waktu tertentu Hari Aksi adalah kesempatan bagi semua warga di sekolah murid, guru dan staf lain serta pihak yang berkepentingan dari masyarakat setempat, untuk bersama-sama mencapai beberapa target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi. Hari Aksi perlu terencana, baik dalam hal mengalokasikan tanggung jawab dan memastikan bahwa semua orang tahu tentang mereka. Action day penting, tetapi kegiatan rutin juga sangat penting. Kegiatan seperti daur ulang, penghematan energi dan air hanya berhasil jika semua orang yang terlibat.Melibatkan masyarakat luas dalam sekolah adiwiyata sangat bermanfaat. Orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan pemerintah lokal dan dunia usaha dapat menjadi referensi untuk memperkaya informasi, pelatihan atau membantu membiayai kegiatan. Melibatkan masyarakat dan media masa untuk memperluas penyebaran informasi misalnya dengan membuat newsletter, press release ke media lokal, dan sebagainya". (WKKK, 52 Th)

Berdasar hasil wawancara dengan responden diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa: untuk mebiasakan siswa dengan kegiatan ringan, menyenangkan yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang pada gilirannya akan membentuk karakter cinta lingkungan hidup. Dan bagaimana cara melibatkan kegiatan rutin (action day) pada orang tua dan masyarakat luas juga melibatkan media masa. Program ini harus juga didukung oleh ketersediaan dana, baik dari sekolah, pemerintah maupun orangtua siswa dan masyarakat. Berkaitan dengan pendanaan Kepala sekolah berpendapat sebagai berikut:

“...tersedianya anggaran dana Program Adiwiyata dari pemerintah sangat diperlukan untuk terlaksananya Program Adiwiyata ini, karena untuk menjalankan Program Adiwiyata membutuhkan dana yang cukup besar. Dukungan atau suntikan dana dari pemerintah sangat diperlukan untuk berjalannya Program Adiwiyata ini. Keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan Program Adiwiyata sangat diperlukan dalam berjalannya Program Adiwiyata. Kegiatan seperti mendaur ulang, penghematan energi dan air akan berhasil jika semua orang terlibat. Sehingga masyarakat sekitar sekolah secara tidak langsung menggerakkan upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang”. (KS, 53 Th)

Berdasar hasil wawancara dengan responden diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk mensukseskan program sekolah berwawasan lingkungan hidup atau Sekolah Adiwiyata diperlukan dana yang tidak sedikit, disini perlu kerjasama pemerintah, Sekolah dan orangtua siswa dan masyarakat.

Faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan Sekolah Adiwiyata Mandiri

Dalam suatu kegiatan atau program, apalagi program yang melibatkan banyak komponen, baik pihak sekolah, siswa maupun orang tua dan masyarakat tentunya tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung, faktor yang sekiranya dapat lebih memperlancar, memuluskan jalannya suatu program.

Faktor penghambat, hal ihwal yang bisa menghambat jalannya suatu program. Sehubungan dengan faktor pendukung dan penghambat tentunya juga mempengaruhi program sekolah berwawasan lingkungan hidup atau Sekolah Adiwiyata. Berhubungan dengan masalah faktor penunjang, disampaikan oleh Guru penanggung jawab program sebagai berikut:

“... faktor pendukung adanya dukungan dan kerjasama Kepala Sekolah, guru, Siswa dan karyawan yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dalam mewujudkan Sekolah Adiwiyata Mandiri” (GRPJ, 56 Th)

Berdasarkan penjelasan responden tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa faktor pendukung program sekolah Adiwiyata Mandiri karena adanya kerjasama yang baik antara Kepala Sekolah, Guru, Siswa dan Karyawan yang telah memiliki tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan tupoksinya. Selanjutnya berkenaan dengan faktor pendukung Wakasek Bidang Kesiswaan berpendapat sebagai berikut:

“...guru-guru dan siswa sangat antusias menghijaukan lingkungan sekolah dengan membawa bibit tanaman dari rumah masing-masing, ada yang membawa bibit tanaman bunga maupun bibit buah-buahan. Masing-masing kelas ada taman kelas dan dibentuk piket untuk merawat tanaman. Menyiangi rumput, memupuk maupun menyiram jika musim panas.... (WKKS, 50 Th)

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penunjang dalam program sekolah berwawasan lingkungan hidup adanya kepedulian guru-guru dan siswa dalam menghijaukan lingkungan sekolah. Dengan kesadaran yang tinggi siswa membawa bibit bunga dan buah dari rumah, serta membuat taman didepan sekolah masing-masing dan diadakan jadwal piket merawat taman.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan program sekolah berwawasan lingkungan hidup atau Sekolah Adiwiyata seperti yang dituturkan oleh Guru Penanggung Jawab Program, sebagai berikut:

“... kami sebagai penanggung jawab program yang kami rasakan kurangnya anggaran. Kalau kita mau mewujudkan sarana prasarana tapi anggaran terbatas membuat kami harus putar pikiran. Anggaran dari pemerintah ada, tapi minim sekali dibanding dengan kebutuhan yang mau diwujudkan. Mau narik dana yang agak besar orangtua siswa tidak memungkinkan walaupun diwasiliasi oleh Komite Sekolah. Karena sekolah kami sekolah pinggiran yang sosial ekonomi orang tua siswa menengah ke bawah...” (GRPJ, 56 Th)

Hasil wawancara dengan responden di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah dalam mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan hidup atau Sekolah Adiwiyata serta rendahnya status sosial ekonomi orang tua siswa. Faktor penghambat yang lainnya adalah juga disampaikan oleh Kepala Sekolah, sebagai berikut:

“... walaupun kami bergerak sudah lumayan baik dan aktif namun saya lihat masih ada beberapa murid malapung tidak banyak masih ogah-ogahan dalam melaksanakan program sekolah, misal diminta untuk piket kebun tidak mau langsung pulang dengan berbagai alasan. Disuruh bawa

bibit bunga atau buah ndak bawa katanya lupa, dirumah tidak ada... anak-anak seperti ini jumlahnya tidak banyak tapi tetap dalam pantauan Tim kami... bagaimana dia akan sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup... (KS, 53 Th)

Menyimak hasil wawancara diatas dengan responden dapat diambil kesimpulan bahwa ada faktor penghambat dalam program ini walaupun sedikit, yaitu: adanya sebagian kecil siswa yang tidak antusias dalam melaksanakan program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan mencermati berbagai hasil temuan penelitian dan paparan data yang disertai pembahasan pada Bab 5, selanjutnya dalam Bab 6 akan disajikan Kesimpulan dan Saran berkaitan dengan hasil penelitian tentang Analisis Kebijakan Kepala Sekolah Menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri (Study Kasus pada SMP Negeri 1 Sumberpucung), dapat dipaparkan sebagai berikut:

Kesimpulan

Kesimpulan Penelitian ini disusun berdasarkan jawaban atas masalah meliputi: 1). Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri: a). Kepala Sekolah telah mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan prosedur yang ada, b). Adanya semangat dan kesadaran yang tinggi dalam menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri. 2). Faktor Pendukung dan penghambat dalam menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri di SMP Negeri 1 Sumberpucung: a). Kerjasama antar berbagai pihak merupakan Faktor pendukung utama dalam menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri, b). Kurang Sinkronisasi program sekolah Adiwiyata Mandiri dengan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

Saran

Saran dalam penelitian ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas maupunkuantitas kegiatan Sekolah Adiwiyata Mandiri, meliputi: a). Beban Kerja Kepala Sekolah perlu dipikirkan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kenyataan dilapangan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumberpucung masih dibebani sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wagir, sehingga menyita waktu dalam persiapan Sekolah Adiwiyata Mandiri, b). Perlu sinkronisasi dengan Dinas Pendidikan Masalah pembangunan Sekolah tentang bantuan bencana dengan waktu penilaian Sekolah Adiwiyata Mandiri

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofar, (2010), *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan (Argumentasi Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah)*, Jakarta, Dian Rakyat
- Al-Adnani, Abu Fatiah, (2008) *Global Warming (Sebuah isyarat dekatnya akhir Zaman dan kehancuran dunia)*, Jakarta: Granada Mediatama
- Anshoriy, Nasruddin dan Sudarsono, (2008). *Kearifan Lingkungan (dalam perspektif budaya jawa)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Arif, Ahmad dan Permanasari, Indira (2009) *Hidup, Hirau, Hijau (Langkah menuju hidup ramah lingkungan)*, Jakarta: Gramedia
- B. Milles, Matthew dan Huberman A. Michael, (2007), *Analisis data Kualitatif* (terjemahan T. Rohendi Rohidi), Jakarta, UI Press
- Canton, James, (2010), *The Extreme Future*, Jakarta, Pustaka Alvabet
- Chang, William, (2009), *Bioetika Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Kanisius
- Daniel, Valerina, (2009), *Easy Green Living*, Jakarta, Hikmah (PT. Mizan Publika)
- Danusaputro, Munadjat, (1984), *Hukum Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta, Binacipta
- Daroeso, Bambang, (1989) *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, Semarang: Aneka Ilmu

- Djamal, Irwan, Zoeraini, (2005), *Tantangan Lingkungan dan Landsekap Hutan Kota*, Jakarta, Bumi Aksara
- Djamal, Irwan, Zoeraini, (2010), *Prinsip-Prinsip Ekologi (Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya)*, Jakarta, Bumi Aksara
- Elmubarok, Zaim, (2008), *Membumikan Pendidikan Nilai*, Bandung, Alfabeta
- Fuji Raharjo, Imam dan Jawama Adam, Sugayo, (2007), *Dialog Hutan Jawa, Mengurai makna Filosofis PHBM*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Fadeli, Chafid dan Nur Utami, (2008), *Audit Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Hariyadi dan B. Setiawan, (2010), *Arsitektur, Lingkungan dan Perilaku (Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi)*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Iskandar, Johan, (2001), *Manusia Budaya dan Lingkungan Ekologi Manusia*, Bandung: Humaniora Utama Press
- Iskandar, Johan, (1992), *Ekologi Perladangan di Indonesia (Studi Kasus: dari daerah Baduy Banten Selatan, Jabar)*, Jakarta, Djambatan
- Jurnal Lingkungan Hidup, (Tahun I-No.1/1994), Jakarta, ICEL K. Dwi Susilo, Rachmad, (2008). *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Kaswari, EM.K (1993), *Pendidikan nilai memasuki tahun 2000*, Jakarta, Grasindo
- Khaelany, (1996), *Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Rineksa Cipta
- Keraf, A. Sonny, (2006) *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Leimona, Beria dan Fauzi, Aunul, (2008), *CSR dan Pelestarian Lingkungan, Mengelola Dampak: Positif dan Negatif*, Jakarta, Indonesia Business Links
- May, Larry dkk, (2001), *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*, Yogyakarta, Tiara Wacana
- May, Larry dkk, (2001), *Etika Terapan II: Sebuah Pendekatan Multikultural*, Yogyakarta, Tiara Wacana
- Mulyana, Rohmat, (2004), *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung, Alfabeta
- Mustafa, Zainal EQ, (2009), *Mengurai Variabel hingga Instrumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Neolaka, Amos, (2008), *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta, Rineksa Cipta
- Riduwan, (2007), *Skala pengukuran variabel-variabel Penelitian*, Bandung, Alfabeta
- Sastrawijaya, Tresna. A, (2009), *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, Rineksa Cipta
- Silalahi, M. Daud, (2001) *Hukum Lingkungan (dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia)*, Bandung, Alumni
- Slamet, Y, (1994), *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta, UNS Press
- Soemarwoto, Otto, (2008), *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan
- Soeriaatmadja, RE, (1997), *Ilmu Lingkungan*, Bandung, ITB
- Soerjani, Mohamad, (2009). *Pendidikan Lingkungan (Environmental Education)*, Jakarta: UI-Press